

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
 NOMOR 45 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas infrastruktur, pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup dalam mendukung konektivitas dan ketangguhan wilayah	Indeks Gini (nilai)	Meningkatnya konektivitas wilayah	Kondisi Jalan Kabupaten Mantap (%)	Dinas PUPR
				Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Cakupan Layanan Sistem Air Limbah Domestik (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Persentase Sampah Tertangani (%)	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten (%)	Dinas PUPR/Dinas Perhubungan
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW (%)	Dinas PUPR
				Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Nilai)	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Mitigasi dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Tradisi dan Budaya yang Diproduksi Sebagai Seni Kreasi Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Menurunnya Angka Putus Studi	Angka Putus Sekolah SD (%)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Angka Putus Sekolah SLTP (%)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan
				Menurunnya Angka Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)	Dinas Kesehatan
				Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani (%)	Dinas Sosial
				Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%)	Dinas Sosial
				Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri (Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (Nilai)	DP2KBP3A
				Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja dan Partisipasi Pemuda	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik	Indeks Evaluasi SPBE (Nilai)	Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik
4	Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan layanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, tepat dan akurat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, serta ramah lingkungan	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (nilai)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDA/PMA) (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Terkendalikannya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan (Nilai)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan sentra industri kecil dan menengah	Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (nilai)	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Meningkatnya daya saing produk perikanan	Persentase Capaian Target Produksi Perikanan (%)	Dinas Perikanan
				Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (nilai)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata Lama Menginap Tamu (hari)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya daya saing UMKM dan kopras	Peningkatan UMKM Aktif (%)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Peningkatan PAD (%)	Badan Pendapatan Daerah

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB
-----	------	--------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
 NOMOR 45 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																									
1	Sekretariat Daerah	Terwujudnya peningkatan efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai EPPD Pemkab Pandeglang	Nilai	Nilai yang diberikan oleh lembaga penilai (kemendagri)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																									
		Meningkatnya Kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan	%	$\frac{\text{Penerapan Kebijakan Daerah Bidang Kesra}}{\text{X 100}}$ Seluruh kebijakan Bidang Kesra	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																									
		Meningkatnya produk hukum yang berkualitas	Jumlah produk hukum	Jumlah	Jelas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																									
		Terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka pengembangan potensi sumber daya daerah	Jumlah MOU dan PKS	Jumlah	Jelas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																									
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas SAKIP dan SDM Pengelola SAKIP	Nilai SAKIP SETDA	Nilai	Nilai yang diberikan oleh lembaga penilai (kemendagri)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																									
		Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah		$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsor yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana:            Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:            IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,75 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 - 2,50	43,75 - 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																										
		1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik																										
		2	1,76 - 2,50	43,75 - 62,50	C	Kurang baik																										
		3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																										
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik																												
Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung	Jumlah	Jelas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																											
Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu kenegaraan	Jumlah	Jelas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																											
Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang perekonomian	Jumlah regulasi terkait bidang perekonomian	Jumlah	Jelas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																											
Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait pelaksanaan Pembangunan	Persentase realisasi fisik dan keuangan	%	$\frac{\text{Realisasi fisik dan keuangan}}{\text{pembangunan Daerah}} \times 100$ Seluruh pembangunan daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																											
Meningkatnya kualitas penataan kebijakan barang dan jasa	Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan	Jumlah	Jelas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah																											

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
		Meningkatnya Kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Regulasi tentang Sumber Daya Alam	Jumlah	Jelas	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Meningkatnya fasilitasi pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah	Persentase jumlah rancangan Perda ditetapkan	%	$\frac{\text{Jumlah Rancangan Perda yang di tetapkan} \times 100}{\text{Hasil rancangan perda yang di tetapkan menjadi perda}}$	Bagian Perundang-undangan	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kapasitas Lembaga DPRD	Jumlah kunjungan kerja/ study banding yang dilaksanakan 1	Kegiatan	36 Kali	Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan	Sekretariat DPRD
			Jumlah penerimaan kunjungan	Kegiatan	30 Kali	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
			Jumlah diklat, seminar, workshop dan kegiatan	Kegiatan	5 Kali	Bagian Umum	Sekretariat DPRD
			Jumlah diklat, seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang	Kegiatan	6 Kali	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
		Terciptanya harmonisasi hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif serta masyarakat	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan eksekutif (pejabat Pemda)	Kegiatan	24 Kali	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyebaran informasi kinerja DPRD	Jumlah mass media yang melaksanakan kerja sama dalam	Mass Media	Jumlah mass media yang menjadi rekanan dalam penyebaran informasi kinerja DPRD (cetak dan elektronik)	Humas & Protokol	Sekretariat DPRD
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan Renstra terhadap	%	Jumlah Prioritas pembangunan Renstra yang sesuai dengan prioritas pembangunan RPJMD x 100%	BAPPEDA	BAPPEDA
			Persentase keselarasan RKPD terhadap	%	Jumlah Prioritas pembangunan RKPD yang sesuai dengan prioritas pembangunan RPJMD x 100%	BAPPEDA	BAPPEDA
		Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan Program pembangunan	%	Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan x 100 Target Pelaksanaan Program Pembangunan	BAPPEDA	BAPPEDA
		Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan hasil kelitbangan pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan	%	Realisasi hasil kajian yang di manfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah x 100 Seluruh hasil kajian yang di manfaatkan untuk perumusan kebijakan	BAPPEDA	BAPPEDA
		Meningkatnya kinerja pelayanan BAPPEDA	Nilai SAKIP Badan	Nilai	Nilai yang diberikan oleh lembaga penilai (kemendagri)	BAPPEDA	BAPPEDA
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana di daerah rawan bencana	Sosialisasi/Bimtek pengurangan risiko bencana, bimtek/pendidikan latihan kebencanaan	%	$\sum$ Petugas yang sosialisasi/bimtek pengurangan resiko bencana dibagi kebutuhan x 100%	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		Terwujudnya Jumlah Desa Tangguh	Pembentukan Desa Tangguh	%	$\sum$ Masyarakat yang peduli dibagi jumlah penduduk x 100 %	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		Adanya regulasi aturan, Perda, Pedoman, SOP yang memadai dalam	Pembuatan dokumen Rencana	%	$\sum$ Dokumen rencana kontijensi (RENKON) perjenis bencana dibagi jumlah bencana x 100 %	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
		penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pembuatan PERDA dan sosialisasinya	%	Jumlah PERDA dan sosialisasi dibagi jumlah kebutuhan x 100 %	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		Berkurangnya Risiko Bencana	Penyediaan sarana Operasional	%	Jumlah sarana dibagi jumlah kebutuhan x 100 %	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		Terwujudnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang efektif	Pengadaan Logistik kebutuhan dasar	%	Jumlah logistik kebutuhan dasar korban bencana dibagi jumlah sarana dan prasarana yang tersedia x 100 %	Seksi Damkar, Kedaruratan dan Logistik	BPBD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung dan peningkatan logistik	Menambah persediaan logistik yang	%	Jumlah logistik kebutuhan dasar korban bencana dibagi jumlah sarana dan prasarana yang tersedia x 100 %	Seksi Damkar, Kedaruratan dan Logistik	BPBD
		Tersedianya kebutuhan dasar untuk korban bencana	Pengadaan Sarana dan Prasarana	%	Jumlah sarana dan prasarana dibagi jumlah evakuasi kebencanaan/kebakaran x 100 %	Seksi Damkar, Kedaruratan dan Logistik	BPBD
		Bekurangnya risiko bencana kebakaran	Pengadaan Pos bayangan di wilayah Strategis	%	Jumlah Pos dibagi jumlah wilayah rawan bencana x 100 %	Seksi Damkar, Kedaruratan dan Logistik	BPBD
			Peningkatan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana	%	Jumlah Sumber Daya Manusia dibagi jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran x 100 %	Seksi Damkar, Kedaruratan dan Logistik	BPBD
		Terselenggaranya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal	Penilaian kerusakan dan kerugian korban	%	Jumlah kerusakan dibagi jumlah kerugian korban bencana x 100%	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD
			Fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi	%	Jumlah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi jumlah kerusakan korban bencana x 100%	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD
			Monitoring kebencanaan secara reguler	%	Jumlah kegiatan monitoring dibagi jumlah kecamatan rawan bencana x 100%	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	Jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi baik/ Jumlah jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	Akses Air Minum Layak	%	Target Penanganan Akses air minum layak/ Total Akses air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Akses Sanitasi Layak	%	Target Penanganan Akses sanitasi layak/ Total Akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap	%	Luas wilayah sesuai dengan RTRW/ Luas wilayah Kabupaten Pandeglang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	Luas lahan sawah yang teraliri irigasi/ Luas lahan sawah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Pemenuhan unsur penyelenggaraan bangunan gedung	%	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik/ jumlah gedung pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase peningkatan peningkatan kualitas SDM	%	Peserta yang terlatih/ Target Peserta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB		
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan melayani			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Mempercepat Pembangunan Permukiman yang sehat	Tersedianya infrastruktur kawasan permukiman perkotaan pada			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Mempercepat pembangunan perumahan masyarakat miskin yang berkualitas	Terentaskan desa tertinggal			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Mewujudkan penataan dengan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari	Terwujudnya sistem penataan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
7	Dinas Perhubungan	Pedoman perencanaan dan pengembangan transportasi	Persentase ketersediaan dokumen kajian teknis dan	%	Jumlah dokumen kajian teknis dan database jaringan transportasi x 100 Jumlah Realisasi dokumen kajian teknis dan database jaringan transportasi	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Jasa perhubungan tertib, nyaman, selamat	Jumlah kasus atau pelanggaran	Jumlah	Jelas	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			Persentase kendaraan umum	%	Jumlah Kendaraan umum layak jalan x 100 Jumlah seluruh kendaraan umum	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			Berkurangnya jumlah		Jelas	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Persentase angkutan umum yang tidak memiliki Ijin		%	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek x 100 Jumlah seluruh kendaraan umum	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			Sarana dan prasarana transportasi tersedia	Berkurangnya ketertinggalan dan			Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Tersedianya terminal tipe C			Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Shelter/halte				Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Meningkatkan Keselamatan dan keamanan transportasi	Jumlah lama tempuh	Jumlah	Jelas	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			Jumlah titik rawan kemacetan	Jumlah	Jelas	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya rambu-rambu, marka jalan, APILL, cermin tikung, Guarddrill, Pengujian			Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya kualitas peijinan layak jalan	Persentase ijin yang dikeluarkan sesuai	%	Jumlah ijin yang dikeluarkan sesuai peruntukan x 100 Jumlah seluruh ijin yang dikeluarkan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
Indeks kepuasan dari	Indeks		Mengacu kepada perhitungan formula IKM/SKM	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan			
Lama tempuh proses pembuatan	waktu		Jelas	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan			

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB		
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	indeks	Nilai yang diberikan oleh lembaga penilai (Kementerian KOMINFO)	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	Mengacu kepada perhitungan formula IKM/SKM	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	indeks	Nilai yang diberikan oleh lembaga penilai (Kementerian KOMINFO)	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
			Data Statistik Sektoral yang Update dan terintegrasi	Data	Jelas	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
9	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah volume sampah yang ditangani}}{100} \times \text{Total volume produksi sampah}$	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah dan	
		Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	Komponen perhitungan IKLH yaitu menghitung Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH) dalam 1 tahun. Struktur perhitungan IKLH 100% adalah = 30% Indeks Pencemaran Air + 30% Indeks Pencemaran Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan atau $\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{ITH})$ . Setelah didapatkan nilai IKLH, dikategorikan penilaian IKLH sesuai 7 (tujuh) kategori yaitu: Unggul =>90, Sangat Baik = $82 \leq x \leq 90$ , Baik = $74 < x \leq 82$ , Cukup = $66 < x \leq 74$ , Kurang = $59 < x \leq 66$ , Sangat Kurang = $50 < x \leq 59$	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Bidang Tata Lingkungan	
			Penilaian dan Pemberian Penghargaan	Nilai	Nilai TPA (Program Adipura) $\geq 71$ Nilai Adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait kebijakan	%	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{100\%} \times \text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}$	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
			Meningkatnya Upaya Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase lahan yang dikonservasi	Nilai	$\frac{\text{Luas lahan yang dikonservasi (Ha)}}{\text{Total luas lahan yang dikonservasi}}$	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan
				Terciptanya Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas di	Nilai	Jumlah populasi tanaman di RTH Persentase RTH yang dilengkapi fasilitas bermain, olah raga, pendidikan	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perumusan kebijakan teknis dalam proses penyusunan dan evaluasi APBD/ABPDP	Persentase dokumen kebijakan teknis penyusunan dan	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi APBD/ABPDP yang tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen kebijakan teknis}}$	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Transparansi dan akuntabilitas penyajian informasi laporan keuangan daerah	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	Capaian penilaian laporan keuangan daerah yang diharapkan x 100% Capaian penilaian laporan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola barang milik daerah	Persentase kualitas penyelenggaraan tata kelola barang	%	Capaian kualitas penyelenggaraan tata kelola barang milik daerah yang diharapkan x 100% Capaian kualitas penyelenggaraan tata	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (SAKIP) Opini Laporan Keuangan Daerah (LKD)	Indeks	Jelas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah Investasi tahun n-1 dikurangi Tahun N} \times 100}{\text{Jumlah Investasi Tahun N}}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik (Bidang perizinan dan penanaman modal)	%	Nilai IKM hasil questioner yang diperoleh pada tahun berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	%	$\frac{\text{Jumlah Produksi Hasil pertanian tahun kinerja} - \text{Jumlah produksi hasil pertanian tahun sebelumnya} \times 100}{\text{Jumlah produksi hasil pertanian tahun}}$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terjaminnya Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	%	$\sum \text{konsumsi penduduk dalam satuan g/kapita/hari atau kg/kapita/tahun ditambah 10\%}$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Penurunan Daerah Rawan	%	PPDRP= jumlah ketersediaan Pangan/Jumlah kebutuhan konsumsi tahun n x 100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	%	PPH= % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas	%	$\frac{\text{Jumlah SDM Kepariwisataaan} \times 100}{\text{Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitas dan kuantitas}}$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	Persentase pariwisata berbasis kearifan	%	$\frac{\text{Jumlah Destinasi wisata yang ditangani} \times 100}{\text{Jumlah total destinasi wisata}}$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya Pelestarian cagar budaya dan pengembangan budaya lokal	Persentase pelestarian cagar budaya dan pengembangan budaya lokal	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi pelestarian cagar budaya dan pengembangan budaya lokal} \times 100}{\text{Jumlah target}}$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase peningkatan penerimaan objek	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Berkurangnya jumlah temuan oleh auditor	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah temuan}}$	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pajak Daerah	Bertambahnya akses layanan Pajak Daerah	Jumlah	Jumlah Layanan Pajak Daerah yang dapat diakses	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Peranan koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi yang berdaya saing	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang berdaya saing} \times 100}{\text{Total Koperasi}}$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya koperasi yang sehat dan berkualitas	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas} \times 100}{\text{Total Koperasi}}$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
		Meningkatnya Usaha Kecil Menengah yang mandiri	Persentase usaha kecil menengah yang mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil Menengah} \times 100}{\text{Total Usaha Mikro, Kecil, Menengah}}$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya sarana distribusi dan usaha perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	$\frac{\Sigma \text{PDRB Perdagangan} \times 100\%}{\Sigma \text{Target PDRB}}$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Tata Kelola Pasar	Persentase kenyamanan dan keamanan pasar dalam melakukan transaksi perdagangan	%	$\frac{\Sigma \text{Sarana perdagangan yang terkelola} \times 100\%}{\Sigma \text{Target sarana perdagangan yang dikelola}}$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Beli Jual Pasar	Persentase pencapaian target PAD	%	$\frac{\Sigma \text{Capaian PAD tahun } n \times 100\%}{\Sigma \text{Target PAD tahun } n}$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	Dinas Perikanan	Meningkatnya produksi hasil dan olahan perikanan	Jumlah produksi perikanan	TON	Jelas	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya hasil olahan perikanan	Persentase hasil olahan perikanan	%	$\frac{\text{Jumlah hasil produksi olahan} \times 100}{\text{Target hasil produksi olahan}}$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya konsumsi ikan	Persentase konsumsi ikan	%	$\frac{\text{Jumlah konsumsi ikan(kg)} \times 100}{\text{Target konsumsi ikan daerah(kg)}}$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya inovasi daerah	Jumlah Kegiatan	Junmlah	Jelas	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
17	Inspektorat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks	Jelas	Inspektorat	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Kapabilitas APIP Level 3	Indeks	Jelas	Inspektorat	Inspektorat
		Meningkatnya daya dukung terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan PEMDA	Maturitas SPIP Level 3 Persentase PD dengan nilai SAKIP (minimal B) Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah (BB)	Indeks	Jelas	Inspektorat	Inspektorat
18	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Tatakelola layanan dasar perangkat daerah	Terselenggaranya layanan dasar perangkat daerah			BKPSDM	BKPSDM
		Meningkatnya aparatur struktural dan fungsional sesuai kompetensi	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai	%	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi dan memiliki sertifikat diklat} \times 100}{\text{Jumlah seluruh pegawai}}$	BKPSDM	BKPSDM
		Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian	%	$\frac{\text{Jumlah Proses administrasi kepegawaian yang terbit tepat waktu} \times 100}{\text{Jumlah seluruh proses administrasi}}$	BKPSDM	BKPSDM
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penerapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik antar, suku, agama, ras dan golongan	%	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terjadi antara suku, agama, tas dan golongan tertentu} - \text{periode tertentu} \times 100}{\text{Jumlah konflik yang terjadi antara suku,}}$	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
			Persentase partisipasi politik masyarakat	%	Jumlah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum x 100 Jumlah total penduduk pemilih dalam pemilihan umum	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
20	Dinas Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan implementasi TIK	Persentase tata kelola layanan dasar perangkat daerah sesuai	%	$\frac{\sum \text{Pegawai yang mempunyai nilai SKP baik} \times 100\%}{\sum \text{Pegawai}}$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Layanan	%	$\sum \text{DTKS yang diperbaiki}$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS	Persentase PMKS yang diberikan	%	$\frac{\sum \text{PMKS yang tertangani} \times 100}{\sum \text{PMKS}}$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Persentase meningkatnya jumlah PMKS	%	$\sum \text{Penduduk miskin yang mandiri}$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Persentase PSKS	%	$\sum \text{PKS Aktif}$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	Persentase peningkatan pelatihan dan	%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih} \times 100\%}{\sum \text{Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi/masyarakat/kewirausahaan}}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja dan pelatihan dan produktifitas berbasis kewirausahaan	Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan	%	$\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan} \times 100\%}{\sum \text{Pencari kerja yang terdaftar}}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja, penerapan pengupahan serta pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di perusahaan	Persentase pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan, melalui persyaratan kerja,	%	$\frac{\sum \text{Kasus diselesaikan melalui PB} \times 100\%}{\sum \text{Kasus yang seharusnya diselesaikan PB}}$  $\frac{\sum \text{Perusahaan yang diperiksa} \times 100\%}{\sum \text{Perusahaan yang terdaftar}}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penyelenggaraan, penempatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigran	Persentase transmigran yang mandiri dan berkembang di kawasan	%	$\frac{\sum \text{Transmigran yang ditempatkan} \times 100\%}{\sum \text{Transmigran yang mendaftar}}$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Terciptanya masyarakat yang aktif dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/ kota			Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya layanan pendidikan dasar untuk semua secara merata bagi warga masyarakat	Persentase anak melanjutkan pendidikan dari jenjang SD/MI ke	%	nALsM/NLs x 100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase anak melanjutkan pendidikan dari jenjang SMP/MTs	%	nALsM/NLs x 100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase sekolah dasar yang berstandar Nasional (SDSN)	%	nSDSN/NSD x 100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase sekolah menengah pertama yang	%	nSMPN/NSMP x 100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
			Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI	%	$(nM \text{ SD/MI/N}) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	%	$(nM \text{ SMP/Mts /NP}) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase siswa sekolah dasar yang berprestasi	%	$nSSD \text{ prestasi/NSSD} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase siswa sekolah menengah pertama yang	%	$nSSMP \text{ prestasi/NSSMP} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya akses layanan dan mutu pendidikan usia dini, kursus dan pendidikan masyarakat (PAUD, KURSUS dan DIKMAS)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	$(nA \text{ paud/NA}) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15-59 tahun	%	$(nPbt/NP) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Rasio pelayanan kursus dan pelatihan	%	$(nP/100.000) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan	Persentase pendidik dengan kualifikasi pendidikan	%	nG/NKG	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase tenaga kependidikan semua jenjang yang terlatih	%	$(nT \text{ sertifikat/NTd}) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya tata kelola pendidikan	Persentase database PAUD yang telah di mutakhirkan	%	$(nDPAUD \text{ mutakhir/NPAUD}) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase database SD yang telah di mutakhirkan	%	$(nDSD \text{ mutakhir/NSD}) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase database SMP yang telah di mutakhirkan	%	$(nDSMP \text{ mutakhir/NSMP}) \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Teroptimalisasikannya peran dan fungsi kelembagaan/organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang berkepemimpinan	Jumlah	Jelas	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Teroptimalisasikannya peran dan fungsi kelembagaan/organisasi keolahrgaan serta meningkatkan olahraga di masyarakat	Penguatan organisasi olahraga			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		24	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pelayanan	%	Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Survei

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
		pelayanan	Capaian indikator SPM yang memenuhi target	%	$\frac{\text{Jumlah Indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah Indikator SPM}} \times 100\%$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
			Bed Occupancy Rate (BOR)	%	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu} \times 100\%}{\text{Jumlah tempat tidur} \times 365 \text{ Hari}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
			Average Length of Stay (ALOS)	Hari	$\frac{\text{Jumlah Lama dirawat pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup+meninggal)}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
			Bed Turn Over (BTO)	Kali	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup+meninggal)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
			Turn Over Interval (TOI)	Hari	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times 365 \text{ hari}) - \text{Hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup-meninggal)}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
			Gross Death Rate (GDR)	%	$\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya} \times 1000\%}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup+meninggal)}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
			Net Death Rate (NDR)	%	$\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ Jam dirawat} \times 1000\%}{\text{Jumlah Pasien keluar RS (hidup+meninggal)}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
		Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	%	$\frac{\text{Pendapatan operasional} \times 100\%}{\text{Belanja operasional}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
			Tingkat kemandirian keuangan rumah	%	$\frac{\text{Pendapatan Rumah Sakit} \times 100\%}{\text{Total belanja rumah sakit}}$	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan} \times 100}{\text{Jumlah penduduk}}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan administrasi	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Survei	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak	Terwujudnya Pengendalian penduduk	Angka Kelahiran total (TFR)	Angka	$TFR = 5 \sum_{i=1}^5 ASFR_i$	DP2KBP3A	DP2KBP3A
		Meningkatnya kualitas Hidup perempuan yang berkeadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Jelas	DP2KBP3A	DP2KBP3A
		Meningkatnya kesejahteraan anak	Nilai Cluster hak anak yang	Indeks	Jelas	DP2KBP3A	DP2KBP3A
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi lembaga masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga masyarakat desa yang aktif} \times 100}{\text{Seluruh jumlah lembaga masyarakat}}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya keberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki bumdes aktif	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki bumdes aktif} \times 100}{\text{Jumlah desa yang memiliki bumdes}}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Meningkatkan mutu layanan pemerintahan desa	Indeks kepuasan layanan pemerintahan desa	Indeks	Nilai yang diberikan oleh lembaga penilai (kemendagri)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan dan aset desa	Persentase jumlah desa yang menyusun laporan keuangan dan aset desa	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun laporan keuangan dan aset desa yang sesuai} \times 100}{\text{Jumlah seluruh desa yang m enyusun laporan keuangan dan aset desa}}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB			
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan pelayanan perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina (SD/MI,	%	$\frac{\text{Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang kompeten} \times 100}{\text{Jumlah SDM pengelola perpustakaan}}$	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah koleksi bahan pustaka	Eksemplar	$\frac{\text{Jumlah penambahan buku} \times 100}{\text{Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}$	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam satu tahun} \times 100}{\text{Jumlah kunjungan perpustakaan}}$	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah lokasi pelayanan perpustakaan yang dikunjungi	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan keliling dalam satu tahun} \times 100}{\text{Jumlah kunjungan perpustakaan keliling}}$	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah festival publikasi minat dan budaya baca	Jumlah	Jelas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah kegiatan revitalisasi pengembangan perpustakaan	Jumlah	Jelas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pengelola kearsipan dan pengelola kearsipan	Jumlah tenaga pengelola arsip pada unit kerja yang dibina	Jumlah	Jelas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah unit kerja yang mengelola arsip dinamis	Jumlah	Jelas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah arsip yang terduplikat dalam bentuk informatika	Jumlah	Jelas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah arsip daerah yang dikelola di depo arsip daerah	Jumlah	Jelas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
		29	Dinas Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat	Angka kematian ibu	Skor	Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Angka kematian bayi	Skor	Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ibu hamil	%		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas yang memiliki	%				$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang memiliki kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat} \times 100}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		
Persentase desa/kelurahan yang memenuhi	%				$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan} \times 100}{\text{Jumlah seluruh desa}}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		
Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah						Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		
Puskesmas yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan						Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		
Menurunnya prevalensi						Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PD PENANGGUNG JAWAB	
			Jumlah Puskesmas yang	Jumlah	Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin di	%	Jumlah seluruh ketersediaan vaksin dan obat di <u>puskesmas X 100</u> Jumlah seluruh puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang memiliki SOP Pengelolaan Obat	%	<u>Jumlah ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas X 100</u> Jumlah Target ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki	Jumlah	Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah SDM kesehatan yang	Jumlah	Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya persentase puskesmas yang mendapat			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah UPT Dinas Kesehatan yang memiliki rencana tahunan dan anggaran	Jumlah	Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Monitoring	Jumlah	Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya persentase puskesmas yang melaporkan data			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase tersedianya jaringan komunikasi data	%	Jumlah tersedianya jaringan komunikasi data yang <u>diperuntukan untuk akses pelayanan SIKDA x100</u> Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase kepesertaan masyarakat	%	Jumlah Kepesertaan masyarakat dalam jaminan <u>kesehatan X 100</u> Jumlah seluruh kepesertaan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
30	Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan kecamatan	IKM urusan pemerintahan kecamatan	Skor	Jelas	Kecamatan	Kecamatan
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif <u>dalam kegiatan kecamatan x 100</u> Jumlah total lembaga kemasyarakatan yang	Kecamatan	Kecamatan

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA